

**ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DESA**

**“STUDI KASUS PADA BUMDES MUGI BERKAH DESA PRAPAGAN KECAMATAN JERUKLEGI”**

**Nirvana Virginia<sup>1</sup>, Slamet Rosyadi<sup>2</sup>, Tobirin<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Administrasi Publik, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

[nirnavirginia96@gmail.com](mailto:nirnavirginia96@gmail.com)

**ABSTRAK.**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja BUM Desa Mugi Berkah Desa Prapagan dalam meningkatkan PADes dan melihat faktor-faktor yang menghambat kinerja BUM Desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Sasaran penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung di dalam BUM Desa Mugi Berkah. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dan dokumentasi. Pertama, aspek keluaran (*output*), dalam menjalankan usahanya masyarakat desa Prapagan masih mengeluhkan bahwa harga jual barang/jasa yang ditawarkan BUM Desa masih tinggi. Kedua, aspek hasil (*outcomes*), BUM Desa memiliki unit usaha yang dapat memberikan kualitas yang terbaik dan meningkatkan pendapatan BUM Desa. Ketiga, aspek dampak (*impact*), setelah adanya BUM Desa dapat memberikan dampak pada peningkatan PADes desa Prapagan dan dapat memberikan dampak pada potensi ekonomi desa. Terdapat beberapa kendala yang menghambat kinerja BUM Desa, seperti tenaga pelaksana yang kurang dan keterbatasan modal yang dimiliki. Sehingga BUM Desa kesulitan dalam mengembangkan usahanya.

**Kata kunci:** BUM Desa, Kinerja, Pendapatan Asli Desa

**ABSTRACT**

This study aims to describe the performance of BUM Desa Mugi Berkah Desa Prapagan in increasing PADes and look at the factors that obstruct the performance of BUM Desa. The research method used in this research is descriptive qualitative method. The target of this research is the parties directly involved in the BUM Mugi Berkah Village. Data collection methods used include interviews and documentation. Based on the results of the research that has been done, it shows several points of conclusion. First, the output aspect, in carrying out its business the Prapagan village community still complains that the selling price of goods/services offered by BUM Desa is still high. Second, aspects of outcomes (*outcomes*), BUM Desa has a business unit that can provide the best quality and increase BUM Desa income. Third, the impact aspect, after the Village BUM can have an impact on increasing the PADes of Prapagan village and can have an impact on the village's economic potential. There are several obstacles that hinder the performance of BUM Desa, such as a lack of implementing staff and limited capital owned. So that BUM Desa has difficulty in developing its business.

**Keywords :** BUM Desa, Performance, Original Village Revenue

**PENDAHULUAN**

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mendukung pembangunan yang merata pemerintah Indonesia memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola daerahnya

masing-masing. Hal ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Diharapkan dengan adanya Undang-Undang ini, pemerintah daerah yang lebih memahami tentang potensi daerahnya dapat lebih mengoptimalkan dan memanfaatkan seluruh potensi yang dimilikinya. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini juga memberikan wewenang kepada desa untuk memiliki fasilitas dan infrastruktur aktivitas ekonomi secara mandiri, membangun dan memperkuat kelembagaan yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai basis pertumbuhan ekonomi pedesaan.

Untuk mencapai cita-cita pemerintah daerah dalam memajukan dan mengembangkan desa disusunlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memiliki implikasi luar biasa pada pembangunan Desa. Undang-Undang tersebut mendasari pada asas rekognisi dan asas subsidiaritas yang memungkinkan desa sebagai subjek dan pelaku pembangunan (Widiastuti et al., 2019). Dalam Undang-Undang Desa, perspektif dan substansi pembangunan tidak hanya berorientasi fisik, tetapi sejalan dengan paradigma pembangunan atau pendekatan pembangunan sosial yang menekankan unsur persamaan dan keadilan sosial (Rahmawati & Adi, 2020).

Dengan adanya Undang-Undang Desa juga mendorong terbentuknya pembangunan ekonomi lokal oleh pemerintah desa itu sendiri. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian desa adalah melalui program pemberdayaan masyarakat desa yaitu dengan mendirikan Lembaga Badan Usaha Masyarakat Desa (BUM Desa) (Lestary & Hadi, 2021). BUM Desa merupakan Lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Yunus, 2019). Kondisi ini mendukung masyarakat sebagai pemegang saham dan pemangku kepentingan untuk mengendalikan kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan juga sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) (Srirejeki, 2018).

BUM Desa membawa dampak dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD), yang memudahkan desa untuk dapat melakukan pembangunan dan juga meningkatkan kesejahteraan lebih optimal (Mayarni et al., 2021). Terkadang, kekuatan untuk mendapatkan keuntungan dan tujuan sosial akan menarik ke arah yang berlawanan, menyebabkan ketegangan dan dalam kasus terburuk, kegagalan (Srirejeki, 2018). Namun, tidak sedikit pula BUM Desa yang berhasil bangkit dan dapat meningkatkan PADes dengan keberhasilan usaha BUM Desanya. BUM Desa telah hadir secara signifikan di Indonesia setelah berlakunya UU Desa. Pada tahun 2018, tercatat 39.000 BUM Desa di seluruh tanah air. Namun, pada kenyataannya tidak semua BUM Desa berhasil dalam menjalankan usahanya. Di lapangan, banyak ditemukan yang tergabung hanya beroperasi dalam jangka pendek (Sofyani et al., 2019).

Penelitian tentang kontribusi BUM Desa bagi PADes yang dilakukan oleh Sinarwati (2019) menemukan bahwa BUM Desa di Kabupaten Langkat belum berkontribusi signifikan bagi PADes, hal ini dikuatkan dengan hasil pengamatan bahwa pada tahun 2016 BUM Desa tidak melakukan penyeteroran hasil usaha ke kantor desa. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan pendirian BUM Desa adalah dengan meningkatkan kinerja BUM Desa (Sinarwati & Prayudi, 2021). Kinerja BUM Desa sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Kegiatan operasional BUM Desa seringkali menghadapi kendala-kendala, seperti permasalahan dalam hal permodalan, sistem manajemen yang belum bagus dan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah (Swandari et al., 2017). Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUM Desa juga harus didukung oleh pelaporan yang akuntabel untuk membantu dalam pengambilan keputusan.

Bake et al. (2021) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa 60% BUM Desa di Provinsi Jawa Barat tidak berkembang dan mati karena ketidakmampuan mengidentifikasi dan memilih pasar yang tepat. Di Pariaman (Provinsi Sumatera Barat) baru terbentuk 32 BUM Desa dari 50 desa yang ada, dan BUM Desa yang aktif hanya 19 unit saja. Dapat disimpulkan bahwa masih banyak BUM Desa yang belum berpengaruh signifikan dan memberikan kontribusinya kepada pendapat asli desa (PADes) di Indonesia. Astuti et al. (2022) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa dari permasalahan pengelolaan BUM Desa ditemukan di semua dimensi kriteria pengembangan BUM Desa, yaitu : cakupan pasar yang masih terbatas, keterbatasan modal dan

asset. Hal ini disinyalir terdapat kesulitan untuk melakukan pengembangan suatu usaha yang baru dan adanya keterbatasan dalam inovasi melalui pengembangan produk lokal.

Beberapa BUM Desa tidak memiliki unit usaha, mereka umumnya hanya menggunakan papan nama untuk menunjukkan keberadaannya. Bahkan, jika mereka memiliki unit usaha umumnya hanya berupa unit simpan pinjam dan sewa. Hal tersebut menjadi kendala dalam pengelolaan BUM Desa, dimana BUM Desa seringkali tidak dapat berkontribusi terhadap PADes. Untuk mengetahui apakah tujuan didirikannya BUM Desa sudah tercapai, maka perlu untuk melakukan penilaian selama proses pelaksanaan dalam kurun waktu tertentu. Hal ini dapat dilihat melalui kinerja organisasi, sebagai bentuk penilaian yang akan berpengaruh dalam menentukan keputusan atau langkah kebijakan yang akan ditempuh. Menurut Rivai dan Basri (dalam Sinambela, 2012) bahwa kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang atau keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan lebih dahulu dan disepakati bersama.

Kecamatan Jeruklegi merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Cilacap. Terdapat 13 desa di Kecamatan Jeruklegi, desa di kecamatan Jeruklegi sudah seluruhnya memiliki BUM Desa. Dengan adanya BUM Desa diharapkan dapat meningkatkan PADes yang nantinya akan berpengaruh juga terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Berikut adalah data klasifikasi BUM Desa di Kecamatan Jeruklegi :

Tabel 1. Data Klasifikasi BUM Desa Kecamatan Jeruklegi

NO	DESA	NAMA BUMDESA	KLASIFIKASI BUMDESA (2020)
1.	Citepus	Budi Luhur	Tumbuh
2.	Tritih Lor	Margo Sejahtera	Tumbuh
3.	Sawangan	Maju Bersama	Tumbuh
4.	Sumingkir	Wijaya Kusuma	Tumbuh
5.	Cilibang	Makmur Jaya	Tumbuh
6.	Karangkemiri	Mekar Gemilang	Tumbuh
7.	Jambusari	Jaya Sari Mandiri	Tumbuh
8.	Prapagan	Mugi Makmur	Berkembang
9.	Jeruklegi Wetan	Bangkit Makmur	Tumbuh
10.	Tritih Wetan	Bakal Makmur	Tumbuh
11.	Mandala	Mandala Makmur	Tumbuh
12.	Jeruklegi Kulon	Sinar Mitra Usaha	Dasar
13.	Brebeg	Mugi Makmur	Dasar

Sumber : Dispermades Kabupaten Cilacap

Berdasarkan data di atas klasifikasi BUM Desa di Kecamatan Jeruklegi terlihat bahwa 2 (dua) BUM Desa memiliki klasifikasi dasar, 10 (sepuluh) BUM Desa memiliki klasifikasi tumbuh dan hanya 1 (satu) BUM Desa dengan klasifikasi berkembang. Dapat disimpulkan bahwa kinerja BUM Desa di Kecamatan Jeruklegi masih rendah.

Dari data tersebut terlihat bahwa BUM Desa Mugi Berkah Desa Prapagan adalah BUM Desa yang memiliki klasifikasi berkembang. BUM Desa Mugi Berkah berdiri pada tahun 2016 melalui

Peraturan Desa Nomor 06/IX/2016. Namun, BUM Desa Mugi Berkah mulai rutin menjalankan usahanya pada tahun 2019. BUM Desa Mugi Berkah berdiri dengan modal awal sebesar Rp 50.000.000,00 yang bersumber dari dana desa. Unit usaha yang dimiliki BUM Desa Mugi Berkah sampai dengan saat ini adalah unit usaha persewaan tratag dan mesin molen, unit usaha perdagangan sembako, unit pertamini, unit usaha perdagangan ATK dan unit usaha air minum isi ulang. Akan tetapi jenis usaha yang dilakukan oleh BUM Desa Mugi Berkah masih berfokus pada unit persewaan dan perdagangan saja, belum memiliki upaya dalam pemberdayaan potensi yang dimiliki desa seperti pariwisata dan pertanian. Dalam menjalankan usahanya BUM Desa Mugi Berkah mendapatkan penyertaan dana dari Pemerintah Desa Prapagan. Penyertaan modal yang diperoleh BUM Desa Mugi Berkah adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Penyertaan Modal BUM Desa Mugi Berkah

Tahun	Jumlah	Sumber	Keterangan
2017	Rp 50.000.000,-	Pemerintah Desa Prapagan	Berupa tratag (perlengkapan tenda hajatan).
2018	Rp 20.000.000,-	Pemerintah Desa Prapagan	Berupa mesin molen.
2019	Rp 100.000.000,-	Pemerintah Desa Prapagan	Berupa mesin depot air mineral, mesin fotocopy dan pom mini.
2019	Rp 30.000.000,-	Pemerintah Desa Prapagan	Digunakan untuk pengadaan barang warung sembako.
2020	Rp 19.000.000,-	Pemerintah Desa Prapagan	Digunakan untuk penambahan modal warung sembako.

Sumber : BUM Desa Mugi Berkah

Pada tabel 2, disebutkan bahwa modal awal BUM Desa Mugi Berkah dari pemerintah desa Prapagan pada tahun 2017 diserahkan dalam bentuk penyertaan modal berupa tratag (perlengkapan tenda hajatan) sebesar Rp 50.000.000,-. Sampai dengan tahun 2020, BUM Desa Mugi Berkah mendapatkan penyertaan modal dari pemerintah desa sebanyak total Rp Rp 219.000.000,-. Dengan adanya penyertaan modal tersebut, seharusnya dapat mempermudah BUM Desa Mugi Berkah dan pemerintah desa Prapagan dalam bersinergi mencapai tujuan dibentuknya BUM Desa.

Tabel 3. Perkembangan Pendapatan Bidang Usaha Tahun 2020

No	Uraian	Pendapatan Bersih (Rp)
1	Pendapatan Unit Usaha Tratag+Molen	5.000.000
2	Pendapatan Unit Usaha Sembako	15.878.275
3	Pendapatan Unit Usaha Pom Mini	4.541.000
4	Pendapatan Unit Usaha Fotocopy dan penjualan ATK	12.684.125
5	Pendapatan Unit Usaha Air Minum Isi Ulang	3.930.000
Jumlah		42.033.400

Sumber : BUM Desa Mugi Berkah

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pendapatan bersih BUM Desa Mugi Berkah sebesar Rp 42.033.400,00. Dari hasil pendapatan usaha yang telah dijalankan BUM Desa Mugi Berkah juga turut berkontribusi terhadap pendapatan asli desa (PADes) desa Prapagan. Direktur BUM Desa menyebutkan bahwa pada tahun 2021 BUM Desa Mugi Berkah berkontribusi terhadap PADes sebesar Rp 12.610.00,00. Akan tetapi pada tahun 2022, kontribusi terhadap PADes hanya sebesar Rp 5.000.000,00.

Dalam menjalankan usahanya BUM Desa Mugi Berkah memiliki susunan pengurus harian lengkap, terdiri dari penasehat hingga manajer unit usaha BUM Desa. Apabila melihat tugas pokok

dan fungsinya, seharusnya pengurus BUM Desa sudah mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Kinerja BUM Desa tidak hanya dilihat dari kemampuan sumber daya pengelola saja, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa terdapat urgensi untuk melakukan penelitian kinerja BUM Desa Mugi Berkah untuk melihat mengapa kontribusi terhadap PADes masih rendah dilihat dari kinerja BUM Desa Mugi Berkah. Penelitian ini diharapkan nantinya dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun sebuah kebijakan terkait BUM Desa yang mana kebijakan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja BUM Desa di Indonesia. Karena pentingnya peran BUM Desa dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa, dan untuk melihat tercapainya tujuan didirikannya BUM Desa dapat dilihat dari kinerjanya.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Kinerja

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika (Prawirosentono, dalam Sinambela, 2012). Sedangkan Rivai dan Basri (dalam Sinambela, 2012) bahwa kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang atau keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan lebih dahulu dan disepakati bersama.

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, dalam P et al., 2022). Kinerja menurut Fahmi (dalam P et al., 2022) adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat *profit oriented* dan *non profit oriented* yang dihasilkan selama satu periode waktu. Kinerja merupakan prestasi yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan selama periode tertentu sesuai dengan standard serta kriteria yang ditetapkan untuk pekerjaan tersebut (Ismail, dalam P et al., 2022).

Bernardin dan Rusell (Sinambela, 2012) mengatakan bahwa parameter atau kriteria yang digunakan dalam menilai kinerja meliputi (1) kualitas, (2) kuantitas, (3) ketepatan waktu, (4) penghematan biaya, (5) kemandirian atau otonomi dalam bekerja (tanpa selalu disupervisi), dan (6) kerjasama. Menurut Mustopadidjaja (2003) indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dan dikategorikan dalam masukan (input), keluaran (output), hasil (Outcomes), manfaat (benefit) dan dampak (impacts). Mahsun (2013) menjelaskan bahwa indikator kinerja meliputi indikator masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak, dengan penjelasan berikut:

1. Indikator masukan (*input*), merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), sumber daya manusia, peralatan, material dan masukan lain, yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumber daya, suatu lembaga dapat menganalisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan. Tolok ukur ini dapat pula digunakan untuk perbandingan (*benchmarking*) dengan lembaga-lembaga yang relevan.
2. Indikator proses (*process*), dalam indikator proses, organisasi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis

pelaksanaan kegiatan organisasi. Efisiensi berarti besarnya hasil yang diperoleh dengan pemanfaatan sejumlah input. Sedangkan yang dimaksud dengan ekonomis adalah bahwa suatu kegiatan dilaksanakan lebih murah dibandingkan dengan standar biaya atau waktu yang telah ditentukan.

3. Indikator keluaran (*output*), adalah suatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh karena itu, indikator keluaran harus sesuai lingkup dan sifat kegiatan instansi.
4. Indikator hasil (*outcomes*), adalah segala hal yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama dari sekedar keluaran. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu hasil kegiatan telah tercapai. Hasil menggambarkan tingkat pencapaian atau hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator hasil, organisasi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk keluaran memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.
5. Indikator manfaat (*benefit*), adalah suatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi dan waktu).
6. Indikator dampak (*impact*), adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif dan negatif. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi.

Berdasarkan pengertian mengenai kinerja yang telah dipaparkan diatas, kinerja merupakan sebuah perbandingan antara apa yang dilakukan oleh individu dengan apa yang telah ditetapkan sebagai tujuan dari sebuah organisasi. Dengan demikian dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah sebuah hasil kerja dari apa yang dilakukan individu dalam mencapai tujuan organisasi baik secara kualitas dan kuantitas dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar dan target-target yang ada.

### **Badan Usaha Milik Desa**

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki desa di mana dapat berasal dari kekayaan, potensi desa atau dari masyarakat desa. Adanya BUM Desa menjadi harapan bagi sebagian masyarakat desa karena bergerak langsung di dalam masyarakat yang dapat mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, produktivitas ekonomi, sehingga terjadi peningkatan pendapatan asli desa (PADes). Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa pada pasal 1 ayat 1 disebutkan :

“Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebcsar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggali dan menemukan definisi atau pemahaman mengenai fenomena pada suatu keadaan yang bersifat kompleks yang pada akhirnya

berpengaruh pada perilaku, persepsi, tindakan dan motivasi. Adapun metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

*Output* merupakan salah satu aspek dalam penelitian ini, dimana *output* adalah suatu hal yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa hasil fisik atau non fisik. Dalam penelitian ini untuk mengetahui kinerja BUM Desa Mugi Berkah dalam peningkatan PADes melalui aspek *output* dapat dilihat menggunakan sub aspek barang/jasa yang dihasilkan BUM Desa. Aspek *output* berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjalankan usahanya BUM Desa Mugi Berkah berusaha untuk menyediakan barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menawarkan harga yang terjangkau oleh masyarakat. BUM Desa berusaha untuk tidak mengambil untung terlalu besar agar harga dapat menyesuaikan dengan permintaan masyarakat. Akan tetapi, walaupun harga barang/jasa yang ditawarkan sudah cukup murah, seringkali masih ada keluhan dari masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh pada saat penelitian BUM Desa Mugi Berkah sudah memiliki unit usaha yang dapat menunjang keberlangsungannya dalam mencapai tujuan. Unit usaha yang ada seperti penyewaan tenda hajatan, penyewaan molen, perdagangan sembako, perdagangan ATK dan fotocopy serta agen air minum isi ulang. Sedangkan pada aspek *outcomes* dapat digunakan untuk melihat kinerja BUM Desa, *outcomes* adalah segala hal yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Dengan *outcomes*, organisasi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk keluaran memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Dalam penelitian ini untuk mengetahui kinerja BUM Desa Mugi Berkah dalam peningkatan PADes melalui aspek *outcomes* dapat dilihat menggunakan sub aspek kualitas barang/jasa yang dihasilkan dan pendapatan BUM Desa. Berdasarkan hasil penelitian, BUM Desa Mugi Berkah berusaha untuk memberikan hasil kualitas barang/jasa yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa Prapagan. Dengan memberikan kualitas yang terbaik diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat desa Prapagan terhadap BUM Desa Mugi Berkah.

Pada sub aspek pendapatan BUM Desa, dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa pendapatan BUM Desa Mugi Berkah pada tahun 2020-2022 mengalami penurunan yang signifikan karena terkena dampak dari pandemi Covid-19. Biaya perbaikan alat penunjang unit usaha juga mengakibatkan penurunan pendapatan BUM Desa. Hal ini mengakibatkan BUM Desa Mugi Berkah mengalami kerugian. Pendapatan BUM Desa pada tahun 2020 sebesar Rp 42.033.400,00 menurun menjadi Rp 19.918.800,00 pada tahun 2021, dan untuk tahun 2022 sampai dengan bulan Juli mendapat Rp 7.239.500,00. Pendapatan BUM Desa yang mengalami penurunan ini, juga berpengaruh terhadap penurunan kinerja BUM Desa karena tujuan BUM Desa untuk memberikan PADes tidak dapat tercapai.

Selanjutnya pada aspek *Impact* digunakan sebagai salah satu aspek untuk menilai kinerja BUM Desa Mugi Berkah. *Impact* adalah pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif, pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang ditetapkan. Dalam penelitian ini untuk melihat kinerja melalui aspek *impact*, digunakan sub aspek peningkatan pendapatan asli desa (pades) dan melihat apakah potensi yang dimiliki desa dapat berkembang atau tidak. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa salah satu tujuan dari didirikannya BUM Desa adalah untuk dapat meningkatkan PADes desa Prapagan yang nantinya dapat memberikan peningkatan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan BUM Desa Mugi Berkah setiap tahunnya sudah berkontribusi terhadap PADes Desa Prapagan, dengan nilai nominal yang berbeda setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2021 berkontribusi sebesar Rp 12.610.000,00, dan pada tahun 2022 berkontribusi sebesar Rp 5.000.000,00.

Akan tetapi, untuk tahun ini BUM Desa Mugi Berkah dikhawatirkan belum mampu memberikan PADes secara maksimal seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan

pendapatan BUM Desa menurun dan jumlah pengeluaran yang membengkak untuk biaya pemeliharaan alat pendukung unit usaha. Dalam rangka untuk meningkatkan kontribusi terhadap PADes terdapat beberapa langkah yang akan diambil seperti mencari agen sembako yang lebih murah dan membuat unit usaha baru.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data, peneliti menyimpulkan bahwa kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Mugi Berkah dalam peningkatan pendapatan asli desa (PADes) masih belum maksimal. Hal ini dilihat dari kemampuan BUM Desa Mugi Berkah dalam berkontribusi terhadap PADes masih rendah. Secara rinci dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Barang/jasa yang dihasilkan oleh unit-unit usaha pada BUM Desa sudah cukup memenuhi kebutuhan masyarakat desa Prapagan. Akan tetapi masih terdapat keluhan masyarakat, seperti harga barang masih terlalu mahal. Kendati demikian BUM Desa Mugi Berkah dan pemerintah desa Prapagan terus berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja BUM Desa dilihat dari aspek *output* sudah cukup baik.
2. BUM Desa Mugi Berkah mempunyai unit-unit usaha yang berusaha untuk memberikan kualitas yang terbaik kepada masyarakat desa. Pendapatan BUM Desa Mugi Berkah mengalami penurunan yang signifikan karena dampak dari pandemi Covid-19. Penurunan pendapatan BUM Desa juga diakibatkan karena banyaknya alat penunjang unit usaha yang mengalami kerusakan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja BUM Desa dilihat dari aspek *outcomes* masih belum baik. Karena BUM Desa Mugi Berkah belum dapat menghasilkan pendapatan yang optimal.
3. BUM Desa Mugi Berkah belum dapat belum mampu memberikan PADes secara maksimal seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pendapatan BUM Desa menurun dan jumlah pengeluaran yang membengkak untuk biaya pemeliharaan alat pendukung unit usaha. Potensi desa Prapagan belum dapat dikembangkan secara maksimal oleh BUM Desa Mugi Berkah. Sehingga, hal tersebut menyebabkan peningkatan kesejahteraan belum dapat dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja BUM Desa Mugi Berkah dilihat dari aspek *impact* masih rendah. Karena BUM Desa Mugi Berkah belum dapat berkontribusi secara maksimal terhadap PADes.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, P. Y., Tamala, Y. F., & Mafruhat, A. Y. (2022). Tantangan Dan Peluang Percepatan Pengembangan BUMDES Menuju Status Berkembang Dan Maju Di Kabupaten Cilacap. *Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 7(1), 127–142. <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/nuansaakademik/article/view/1168>
- Bake, J., Akib, H., & Niswaty, R. (2021). Management Model and the Success Factors of Village Owned Enterprises (VOEs) in Indonesia. *International Journal of Economics and Business Administration*, IX(Issue 2), 82–100. <https://doi.org/10.35808/ijeba/690>
- Lestary, R. A., & Hadi, K. (2021). Community Empowerment through Village-Owned Enterprises Activities as a Regional Development Strategy in Indonesia: A Systematic Literature Review. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 5(2), 487–514. <https://doi.org/10.14421/jpm.2021.052-09>
- Mahsun, M. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFPE.
- Mayarni, M., As'ari, H., & . A. (2021). Tourism Governance: Bumdes As the Spirit of Community Economic Empowerment. *Sosiohumaniora*, 23(1), 65. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v23i1.30669>
- Mustopadidjaja, A. (2003). *Manajemen Proses Kebijakan Publik. Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja LAN RI*. Duta Pertiwi Foundation.
- P, L. F. E., P, A. S. M., & Sinaga, I. (2022). Analisis Kinerja Keuangan BUMDes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Pandemi. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(1), 9–15.

- Rahmawati, E., & Adi, I. R. (2020). Measurement of BUMDesa Development: A Literature Study. *Forum Ilmu Sosial*, 47(December), 64–72.
- Sinambela, L. P. (2012). *Kinerja Pegawai: Teori, Pengukuran dan Implikasi*. Graha Ilmu.
- Sinarwati, N. K., & Prayudi, M. A. (2021). Kinerja Badan Usaha Milik Desa Dan Kontribusinya Bagi Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(3), 505. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i3.37931>
- Sofyani, H., Atmaja, R., & Rezki, S. B. (2019). Success Factors of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Performance in Indonesia: An Exploratory Study. *Journal of Accounting and Investment*, 20(2). <https://doi.org/10.18196/jai.2002116>
- Srirejeki, K. (2018). Empowering the role of village owned enterprises (Bumdes) for Rural Development: case of Indonesia. *Journal of Accounting, Management, and Economics*, 20(1), 5–10.
- Swandari, N. K. A. S., Setiawina, N. D., & Marhaeni, A. A. I. N. (2017). Analisis Faktor-Faktor Penentu Kinerja Karyawan BUMDes di Kabupaten Jembrana. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(VOLUME.06.NO.04.TAHUN 2017), 1365–1394.
- Widiastuti, H., Putra, W. M., Utami, E. R., & Suryanto, R. (2019). Menakar tata kelola badan usaha milik desa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(2), 257–288. <https://doi.org/10.24914/jeb.v22i2.2410>
- Yunus, R. (2019). *Peranan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng*. 4(3), 9–25.